

Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website (*Studi Empiris Berbasis POJK No.8 Tahun 2015*)

Rivansyah^{1✉}, Liza Alvia²

^{1 2}Akuntansi, Universitas Lampung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website (TPIKBW) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2023. Sampel ditentukan melalui *purposive sampling* dan menghasilkan 332 observasi. Pengujian dilakukan menggunakan regresi linear berganda setelah memenuhi uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi berbasis website berada pada kategori sedang. Secara empiris, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPIKBW, yang mengindikasikan bahwa semakin kuat struktur tata kelola, semakin tinggi komitmen perusahaan dalam transparansi digital. Sebaliknya, Komite Audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan sehingga perannya dalam mendorong pengungkapan online belum optimal. Uji F mengonfirmasi bahwa ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap TPIKBW. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,243 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 24,3% variasi pengungkapan, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam meningkatkan keterbukaan informasi berbasis website sesuai ketentuan POJK No. 8/2015.

Kata Kunci: Bank digital; volatilitas harga saham; ROA; ROE; BOPO; variabel makroekonomi; Indonesia.

Abstract

This study investigates the determinants of stock price volatility among Indonesian digital banks during the transition to a digitally driven economy. Specifically, it examines the influence of financial performance indicators Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Operational Efficiency Ratio (BOPO) alongside macroeconomic variables such as inflation, interest rates, and the exchange rate, on the extreme stock price fluctuations observed from 2020 to 2023. Employing a quantitative approach with a multiple regression model, the analysis evaluates the relative contribution of each variable to stock price volatility across selected digital banking firms. The findings indicate that ROA and the exchange rate exert a significant effect on stock price movements, while ROE, BOPO, inflation, and interest rates show no statistically significant impact during the study period. These results highlight the sensitivity of digital banking stocks to profitability performance and macroeconomic stability, thereby offering empirical insights for investors, regulators, and financial institutions in managing risks within the rapidly expanding digital banking landscape in Indonesia.

Keywords: Digital banks; stock price volatility; ROA; ROE; BOPO; macroeconomic variables; Indonesia.

✉ Corresponding author : Rivansyah
Email Address : rivanperdana1@gmail.com

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis website dengan berlandaskan POJK No. 8 Tahun 2015. Kajian ini menggunakan teori legitimasi dan teori keagenan sebagai dasar. Teori legitimasi menjelaskan pentingnya pengungkapan informasi untuk memperoleh penerimaan publik, sedangkan teori keagenan menyoroti potensi konflik antara prinsipal dan agen. Sampel penelitian mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2022–2023.

Penelitian ini diperkuat oleh temuan (Alvia *et al.*, 2022) yang menunjukkan rendahnya kesadaran perusahaan Indonesia terhadap keterbukaan informasi, hanya 36%. Selanjutnya, (Narsa & Pratiwi, 2018) menemukan bahwa tingkat pengungkapan website berbeda antar perusahaan dan dipengaruhi ukuran serta kesadaran transparansi. Padahal, POJK No. 8 Tahun 2015 mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan melalui *website*, namun implementasinya masih belum optimal.

Kemajuan teknologi informasi seharusnya mendorong perusahaan memanfaatkan website sebagai media utama penyebaran informasi. Namun, pemanfaatan digital tidak secara otomatis meningkatkan transparansi. Karena itu, tata kelola perusahaan menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas pengungkapan online. Struktur tata kelola seperti dewan direksi, komisaris, dan komite audit berperan strategis dalam mendorong keterbukaan informasi, termasuk TPIKBW (Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website) (TPIKBW). Kelemahan tata kelola dapat menyebabkan rendahnya pengungkapan.

POJK No. 8/POJK.04/2015 menjadi dasar kewajiban bagi perusahaan publik untuk melaporkan informasi secara online. Namun penelitian terdahulu menunjukkan kepatuhan masih beragam. (Kalbuana *et al.*, 2021) membuktikan bahwa pengungkapan informasi berbasis website berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan.

Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh (Alvia *et al.*, 2022) yang menegaskan fungsi POJK No. 8/2015 dalam mendorong transparansi online, mencakup pengungkapan tata kelola, informasi umum emiten, informasi bagi pemodal, serta informasi tanggung jawab sosial. Meskipun digitalisasi semakin maju dan perusahaan semakin bergantung pada internet, tidak semua perusahaan memanfaatkan *website* secara optimal untuk pengungkapan.

TPIKBW menjadi sinyal penting bagi investor dan kreditor terkait kinerja dan prospek perusahaan. Namun tingkat pengungkapan masih dianggap kurang memadai. Menurut Arin (2014), keterbukaan informasi website memengaruhi frekuensi perdagangan saham. Penelitian Reskino & Sinaga (2017) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan website pada sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan di BEI.

Pengungkapan informasi melalui *website* menjadi strategi penting perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak luar seperti

investor dan kreditor. Kualitas pengungkapan yang baik memengaruhi keputusan investor dan mendorong peralihan dari pelaporan berbasis kertas menuju pelaporan digital. *Website* perusahaan menyediakan media yang lebih cepat, murah, dan mudah diakses untuk publikasi laporan keuangan serta informasi lain yang dikenal sebagai pengungkapan informasi korporasi berbasis website (TPIKBW), yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat.

Pengungkapan online dilakukan agar informasi mengenai perkembangan perusahaan dapat segera diakses oleh pengguna. Pengungkapan sukarela meningkatkan transparansi, sementara tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti memaksimalkan laba dan nilai perusahaan (Meidiawati, 2016), menuntut penyampaian informasi yang jelas kepada publik.

Tata kelola perusahaan menjadi penting untuk mencegah benturan kepentingan, menjaga kesinambungan bisnis, dan mendorong keunggulan kompetitif. Tata kelola yang baik mendukung kinerja perusahaan, baik dari sisi profitabilitas, pertumbuhan, struktur keuangan, maupun perlakuan terhadap pemegang saham. Sebaliknya, tata kelola yang buruk dapat memicu kesulitan keuangan bahkan kebangkrutan (Pramudena, 2017). Implementasi tata kelola juga membantu mengurangi masalah keagenan dan risiko kebangkrutan (Hanifah & Purwanto, 2013).

Beberapa perusahaan memanfaatkan TPIKBW untuk meningkatkan transparansi dan memengaruhi keputusan investasi secara positif. Menurut OJK, penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan operasi dan kinerja keuangan perusahaan. Penilaian kinerja menjadi indikator penting kesuksesan perusahaan. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait pengaruh tata kelola terhadap TPIKBW, sehingga diperlukan penelitian baru dengan data terbaru, sektor berbeda, serta mengacu pada regulasi yang berlaku.

Penelitian ini mengacu pada POJK No. 8 Tahun 2015 sebagai indeks pengungkapan, yang belum digunakan dalam penelitian sebelumnya, serta menggunakan indeks pengukuran dari (Alvia *et al.*, 2022). Penelitian ini menekankan peran tata kelola perusahaan dalam memengaruhi relevansi informasi akuntansi melalui TPIKBW.

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur karena skala industri yang luas, sistem produksi berkesinambungan, serta interaksi yang tinggi dengan masyarakat. Industri manufaktur juga memiliki kebutuhan pengelolaan modal dan aset yang besar serta sensitivitas tinggi terhadap citra publik, sehingga keterbukaan informasi melalui website menjadi sangat penting.

Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas tata kelola perusahaan terhadap ketaatan manajemen dalam mengungkapkan informasi korporasi berbasis website. TPIKBW diharapkan tidak hanya memuat laporan keuangan, tetapi juga proyeksi arus kas, tren pasar, serta inovasi untuk mengurangi asimetri informasi. Dengan akses informasi yang lebih baik, investor dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait masa depan perusahaan.

METODOLOGI

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan kriteria:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022–2023, dan
2. perusahaan yang menyediakan data lengkap sesuai kebutuhan variabel dan ketentuan POJK No. 8/POJK.04/2015.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Karena data berasal dari sumber resmi, uji validitas tidak dilakukan. Penelitian berfokus pada pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis website.

Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui situs resmi yang menyediakan informasi perusahaan. Penelitian menggunakan hubungan kausalitas untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap dependen. Sampel perusahaan manufaktur periode 2022–2023 ditentukan menggunakan teknik purposive sampling.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen penelitian ini adalah Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website (TPIKBW). Pengungkapan ini merupakan penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan melalui website perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan hubungan dengan investor. Penilaian pengungkapan menggunakan indeks dari POJK No. 8 Tahun 2015, yang mencakup empat kelompok informasi:

- a. informasi umum perusahaan,
- b. informasi bagi investor,
- c. informasi tata kelola, dan
- d. informasi tanggung jawab sosial.

Setiap item diberi skor 1 jika diungkapkan, dan 0 jika tidak. Perusahaan dinilai baik apabila mencapai 100% pemenuhan sesuai ketentuan POJK No. 8/POJK.04/2015 karena pengungkapan ini bersifat wajib. Rumus perhitungan:

$$IPIK = \frac{\text{Skor Yang Diperoleh Perusahaan}}{\text{Skor Maksimal}}$$

Skor maksimal adalah 31, sesuai jumlah item pada POJK No. 8/POJK.04/2015. Unsur pengungkapan yang digunakan mengacu pada penelitian Alvia et al. (2022) dan dijabarkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Item Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website POJK No.8 Tahun 2015

No	Jenis Pengungkapan	Item Pengungkapan
1	Informasi umum emiten (Pasal 7)	Nama, alamat dan kantor pusat emiten atau perusahaan publik. Riwayat singkat emiten dan struktur organisasi emiten atau perusahaan publik. Struktur kepemilikan emiten atau perusahaan publik. Struktur grub emiten atau perusahaan publik dalam bentuk

No	Jenis Pengungkapan	Item Pengungkapan
		bagian. Profil direksi, dewan komisaris, dewan komite, dan sekretaris. Dokumen anggaran dasar.
2	Informasi untuk investor (Pasal 8)	Prospektus penawaran umum. Laporan tahunan 5 tahun terakhir. Informasi keuangan. Informasi rapat umum pemegang saham. Informasi saham seperti jumlah saham beredar atau pemecahan dan penggabungan saham (jika ada). Informasi obligasi. Informasi deviden. Informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik. Informasi atau fakta material.
3	Informasi tata kelola perusahaan (Pasal 9)	Pedoman Kerja direksi dan dewan komisaris. Pengangkatan, pemberhentian, atau kekosongan sekretaris perusahaan. Piagam unit audit internal. Kode etik emiten atau perusahaan publik. Pedoman kerja komite. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit. Uraian prosedur nominasi dan remunerasi. Kebijakan manajemen risiko. Kebijakan mekanisme sistem pelaporan penggaran. Kebijakan anti korupsi. Kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur Kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor.
4	Informasi tanggung jawab sosial (Pasal 10)	Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait lingkungan hidup. Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait ketenagakerjaan. Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Kebijakan, jenis program, dan biaya terkait tanggung jawab produk dan jasa.

Sumber: (POJK No.8/PJOK.04/, 2015)

2. Variabel Independen

a. Dewan Direksi

Menurut Mayangsari (2018) Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab secara langsung atas pengelolaan operasional dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Direksi memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan perusahaan termasuk dalam hal keterbukaan informasi. Dalam konteks pengungkapan informasi berbasis website, dewan direksi berperan aktif dalam menentukan seberapa transparan informasi yang disampaikan kepada publik dan pemangku

kepentingan. Pengukuran dewan direksi diukur dengan cara jumlah anggota dewan direksi pada sebuah perusahaan.

$$\text{Dewan Direksi} = \text{Jumlah Direksi Dalam Perusahaan}$$

3. Dewan Komisaris

Menurut Mayangsari (2018), Dewan komisaris merupakan organ pengawas yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Peran utamanya adalah memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip *good corporate governance* (GCG). Dewan komisaris diharapkan dapat mendorong transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk pengungkapan informasi perusahaan. Pengukuran dewan komisaris diukur dengan cara presentase jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah komisaris secara keseluruhan dalam suatu Perusahaan.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

4. Komite Audit

Menurut Mayangsari (2018), Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas membantu mengawasi pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas pengendalian internal. Komite audit berperan penting dalam mendorong keterbukaan informasi perusahaan serta menjembatani komunikasi antara manajemen dan pemangku kepentingan eksternal. Pengukuran komite audit diukur dengan cara menghitung jumlah anggota komite audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

$$\text{Jumlah Komite Audit} = \text{Jumlah Seluruh Anggota Audit}$$

Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang telah dibangun dan penjelasan variabel-variabel dalam bab sebelumnya, dapat dirumuskan persamaan model penelitian sebagai berikut:

$$\text{TPIKBW} = \alpha + \beta_1 \text{DD} + \beta_2 \text{DK} + \beta_3 \text{KA} + e$$

TPIKBW	:Tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis <i>website</i>
DD	: Dewan Direksi
DK	: Dewan Komisaris
KA	: Komite Audit
α	: Konstanta Regresi
β_1 -3	: Koefisien Regresi
e	: <i>error</i>

Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Nilai dari masing-masing variabel penelitian dideskripsikan dengan berbagai ukuran deskriptif seperti rata-rata (*mean*), simpangan baku (standar deviasi), nilai minimum, dan nilai maksimum.

2. Uji Asumsi Klasik

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, sehingga harus memenuhi asumsi klasik agar menghasilkan estimator yang tidak bias (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekar, 1992). Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{TPIKBW} = \alpha + \beta_1 \text{DD} + \beta_2 \text{DK} + \beta_3 \text{KA} + e$$

Keterangan:

TPIKBW : Tingkat pengungkapan informasi korporasi berbasis *Website*
 DD : Dewan Direksi
 DK : Dewan Komisaris
 KA : Komite Audit
 e : *Standard Error*

4. Uji Hipotesis

Sesudah diperoleh model regresi yang menyatakan hubungan linier antar variabel maka selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Dalam analisis regresi linier berganda secara umum dapat dilakukan tiga analisis yaitu uji koefisien determinasi (R^2), Uji F , dan Uji (t).

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu Ghazali (2005). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

6. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F atau uji kelayakan model digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan fit atau tidak. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Signifikan model regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikan (sig) dimana jika nilai sig di bawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F -statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DD	332	2	15	4,30	2,140
DK	332	2	15	3,82	1,789
KA	332	1	5	2,98	0,384
TPIKBW	332	0%	100%	56%	24%
Valid N (Listwise)	332				

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2024

Descriptive Statistics TPIKBW					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TPIKBW 2022	166	0%	100%	51%	23%
TPIKBW 2023	166	0%	100%	50%	25%

Sumber: Hasil olah data SPSS 25, 2024

Berdasarkan Tabel 2, hasil statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Dewan Direksi

Jumlah anggota dewan direksi pada 332 perusahaan berkisar antara 2 hingga 15 orang, dengan nilai rata-rata sebesar 4,30 dan standar deviasi 2,140. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki struktur dewan direksi yang relatif ramping (4-5 orang), dengan variasi moderat yang dipengaruhi oleh perbedaan skala dan kompleksitas operasional masing-masing perusahaan.

2. Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris berada pada rentang 2 hingga 15 orang, dengan rata-rata 3,82 dan standar deviasi 1,789. Komposisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan menerapkan struktur pengawasan yang efisien namun tetap representatif, dengan tingkat variasi yang moderat antar perusahaan.

3. Komite Audit

Pada 322 perusahaan, jumlah anggota Komite Audit tercatat antara 1 hingga 5 orang, dengan rata-rata 2,98 dan standar deviasi 0,384. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan hampir memenuhi ketentuan ideal minimal tiga anggota komite, dengan variasi rendah karena adanya keseragaman regulasi terkait pembentukan Komite Audit.

4. Tingkat Pengungkapan Informasi Berbasis Website (TPIKBW)

Nilai TPIKBW berkisar antara 0,00 hingga 1,00, dengan rata-rata 0,5641 dan standar deviasi 0,24139. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian perusahaan telah menerapkan transparansi informasi dengan baik melalui website, masih terdapat sejumlah perusahaan yang belum memanfaatkan media digital secara optimal sebagai sarana pengungkapan informasi kepada publik.

Hasil Uji Asumsi Klasik

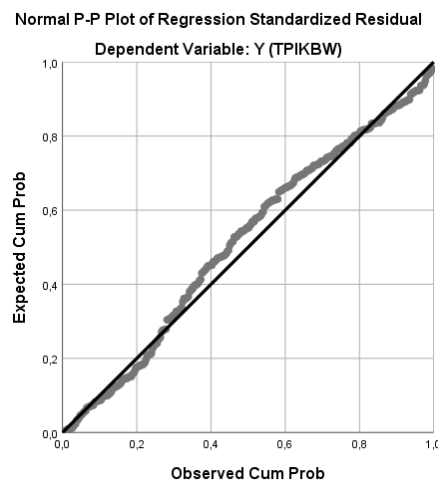
1. Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		332
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,23503704
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,039
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,069 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,069 > 0,05, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi telah terdistribusi secara normal. Sehubungan dengan uji normalitas, peneliti juga akan menggunakan analisis grafik normal plot. Secara singkat ketentuan menggunakan analisis grafik plot adalah titik-titik harus menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi bisa dikatakan memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Probability Plot

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa persebaran data menyebar di dekat garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

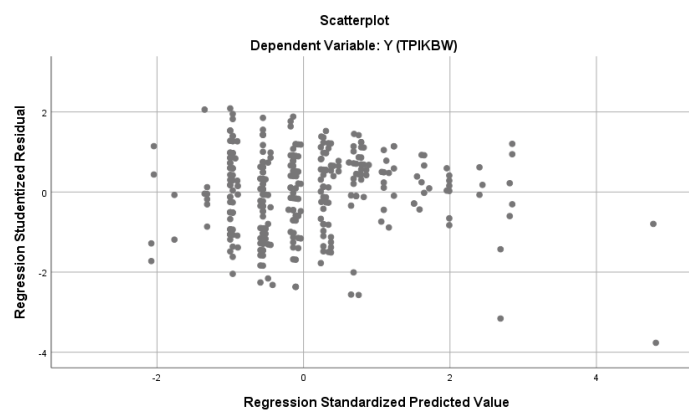
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DD	.636	1,573
	DK	.631	1.586
	KA	.978	1.023

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2024

Dari hasil analisis yang tertera pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa variable Dewan Direksi, Dewan Komirsaris, dan Komite Audit memiliki nilai tolerance yang $> 0,10$, sedangkan nilai VIF yang < 10 pada setiap variabel independennya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2024

Gambar terlihat bahwa titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, persebarannya juga merata. Sehingga disimpulkan dari hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Selain itu, pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji park. Uji park akan meregresikan variabel bebas terhadap nilai logaritma natural linear kuadrat. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Heterokedatisitas menggunakan Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
DD	-,007	,004	-,133	-1,641	,102
DK	,007	,005	,097	1,406	,161
KA	,010	,020	,029	,521	,603

a. Dependent Variable: Y (TPIKBW)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2024

Dari data diatas menunjukkan nilai signifikansi setiap variabel bebas lebih besar dari 0,05, artinya hasil tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini memiliki kesamaan varians di dalam model regresi, dengan kata lain data penelitian ini bersifat homokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b	
Model	Durbin-Watson
1	1.797
Predictors: (Constant), DD, DK, KA	
b. Dependent Variable: Y (TPIKBW)	
<i>Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2024</i>	

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson pada signifikansi 5% sebesar 1,797 dengan jumlah 3 variabel independen dan sampel sebanyak 332. Berdasarkan tabel Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat ditentukan nilai batas bawah (dL) sebesar 1,676 dan batas atas (dU) sebesar 1,765. Nilai Durbin-Watson berada di antara nilai dU dan 4 - dU, yaitu $1,765 < 1,797 < 2,235$ (4 - dU). Dengan demikian, data penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Linier Regresi Berganda

Coefficients^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	,334	,103		3,250
DD	,023	,008	,201	2,984
DK	,002	,009	,014	,208
KA	0,42	,034	,067	1,229
a. Dependent Variable: Y (TPIKBW)				
<i>Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2024</i>				

Berdasarkan Tabel diatas hasil pengujian model regresi berganda, diperoleh hasil

$$\text{TPIKBW} = ,334 + ,023 (\text{DD}) + ,002 (\text{DK}) + 0,42 (\text{KA})$$

Persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,334, yang merupakan nilai konstan dengan arah positif, menandakan bahwa jika variabel Dewan Direksi (DD), Dewan Komisaris (DK), dan Komite Audit (KA) diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka nilai TPIKBW tetap sebesar 0,334. Ini menunjukkan nilai dasar TPIKBW tanpa pengaruh ketiga variabel independen tersebut.
2. Dewan Direksi (DD) memiliki nilai koefisien sebesar 0,023, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 unit pada variabel Dewan Direksi akan meningkatkan TPIKBW sebesar 0,002 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nilai

signifikansi sebesar 0,003 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa pengaruh Dewan Komisaris terhadap TPIKBW bersifat signifikan secara statistik.

3. Dewan Komisaris (DK) memiliki nilai koefisien sebesar 0,002, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 unit pada variabel Dewan Direksi akan meningkatkan TPIKBW sebesar 0,002 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nilai signifikansi sebesar 0,002 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa pengaruh Dewan Direksi terhadap TPIKBW bersifat signifikan secara statistik.
4. Komite Audit (KA) memiliki nilai koefisien sebesar 0,042, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 unit pada variabel Komite Audit akan meningkatkan TPIKBW sebesar 0,042 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Meskipun demikian, nilai signifikansi sebesar 0,220 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa pengaruh Komite Audit terhadap TPIKBW juga tidak signifikan secara statistik.

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson		
1	,228a	,252	,243	,23611	1,797		
a. Predictors: (Constant), DD, DK , KA							
b. Dependent Variable: Y (TPIKBW)							

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2024

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan dari seluruh variabel independen (X) yang terdapat dalam model regresi terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan tabel Model Summary diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,243. Hal ini berarti bahwa 24,3% variabel TPIKBW dapat dijelaskan oleh variabel Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Sedangkan sisanya sebesar 75,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

2. Uji Parsial Statistic (Uji t)

Tabel 6. Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Hasil
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	,334	,103		3,250	,001	
DD	,023	,008	,201	2,984	,003	H1 Terdukung
DK	,002	,009	,014	,208	,002	H2 Terdukung
KA	0,42	,034	,067	1,229	,220	H3 Tidak Terdukung

a. Dependent Variable: Y (TPIKBW)

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25, 2024

Berdasarkan Tabel 9 Diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 terdukung, yang mana secara parsial variabel Dewan Direksi (DD) berpengaruh signifikan terhadap TPIKBW (Y).
- Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,208 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, yang kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 terdukung, yang mana secara parsial variabel Dewan Komisaris (DK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPIKBW (Y).
- Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,229 dengan nilai signifikansi sebesar 0,220, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 tidak terdukung, yang mana secara parsial variabel Komite Audit (KA) tidak berpengaruh signifikan terhadap TPIKBW (Y).

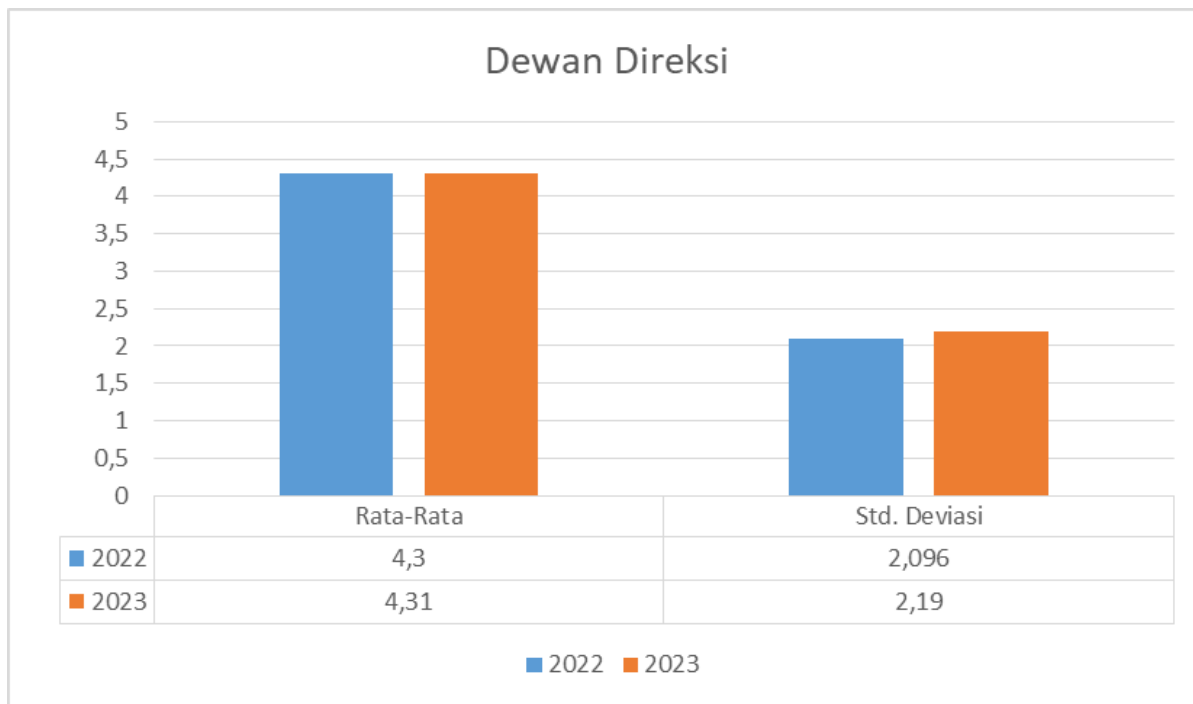
3. Uji Kelayakan Modal (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVAa					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,002	3	,334	5,994	,001b
Residual	18,285	328	,056		
Total	19,288	331			
a. Dependent Variable: Y (TPIKBW)					
b. Predictors: (Constant), DD, DK, KA					

Uji secara simultan (F-Test) menguji kelayakan model atau menilai goodness of fit suatu model penelitian. Uji kelayakan model yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan secara keseluruhan terhadap model regresi Ghazali (2021). Pengujian ini menggunakan perbandingan thitung dan tabel dengan level signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$) pada pengujian dua arah (two tailed). Berdasarkan atas hasil pengujian yang dilakukan dalam tabel tersebut di peroleh hasil yaitu nilai F hitung sebesar 5,994 dengan nilai Sig 0,001, lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Artinya variabel Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap TPIKBW.

1. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website



Gambar 3. Diagram Perbandingan Dewan Direksi Tahun 2022 dan 2023

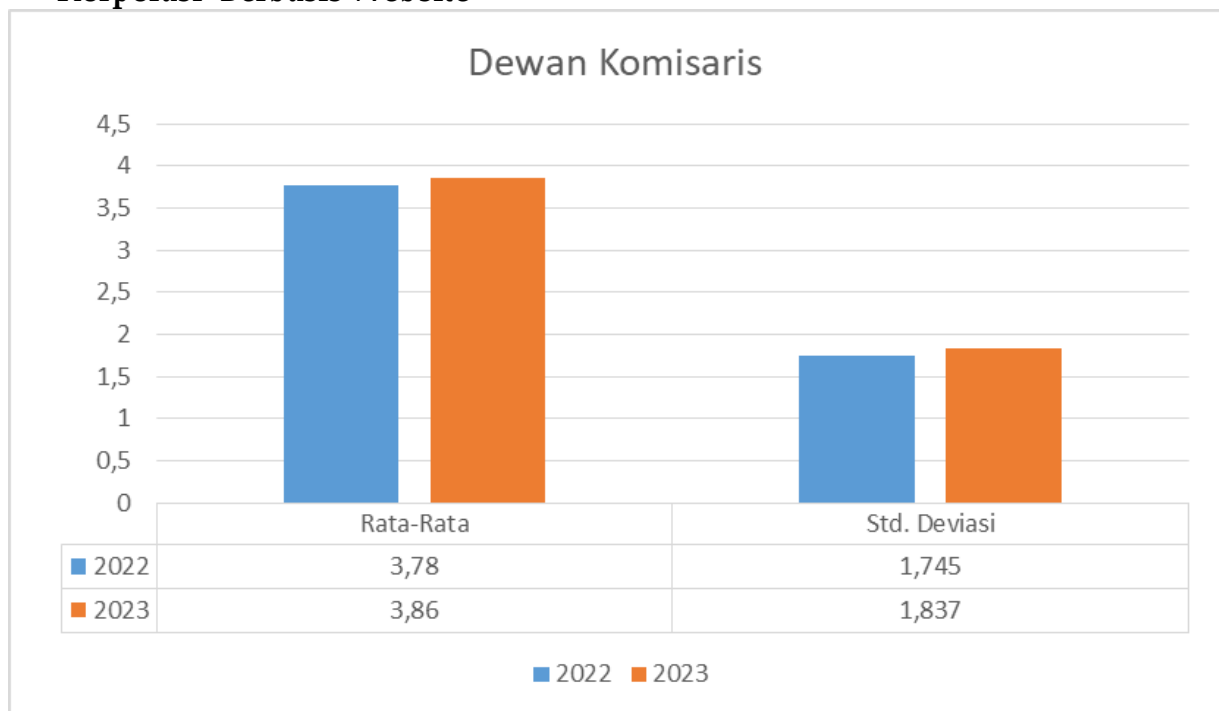
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website (TPIKBW) dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 (lebih besar dari $\alpha = 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan direksi, semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi yang disampaikan melalui website perusahaan. Berdasarkan data deskriptif, rata-rata jumlah anggota dewan direksi pada perusahaan manufaktur adalah 4,30 orang pada tahun 2022 dan 4,31 orang pada tahun 2023, dengan standar deviasi masing-masing 2,096 dan 2,190. Kenaikan kecil pada nilai rata-rata dan standar deviasi tersebut menggambarkan bahwa struktur dewan direksi relatif stabil namun memiliki tingkat variasi antarperusahaan yang sedikit meningkat, menandakan adanya perbedaan ukuran dan kompleksitas organisasi di sektor manufaktur. Selain itu, tingkat rata-rata TPIKBW sebesar 51% pada tahun 2022 dan 50% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan informasi sedikit menurun, perusahaan dengan struktur direksi yang lebih kuat tetap mampu menjaga konsistensi transparansi informasi digital.

Fenomena ini berkaitan dengan kondisi industri manufaktur Indonesia selama periode 2022–2023, di mana banyak perusahaan berupaya menyesuaikan diri terhadap perubahan struktur organisasi dan penerapan sistem pelaporan digital pascapandemi COVID-19. Dalam situasi ini, Dewan Direksi memegang peranan strategis dalam memastikan kebijakan keterbukaan informasi dijalankan secara efektif, baik demi kepentingan pemegang saham maupun masyarakat luas. Jumlah direksi yang relatif stabil dari tahun ke tahun mencerminkan upaya perusahaan mempertahankan struktur kepemimpinan yang efisien guna menjaga koordinasi lintas departemen dan memastikan kewajiban pengungkapan informasi di website berjalan konsisten sesuai dengan ketentuan POJK No. 8 Tahun 2015 tentang keterbukaan informasi emiten atau perusahaan publik. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa peran dewan direksi berfungsi sebagai

mekanisme pengendalian internal untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal) melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Semakin aktif direksi mendorong keterbukaan informasi digital, semakin kuat pula kepercayaan publik terhadap perusahaan. Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan teori legitimasi, di mana perusahaan berupaya mempertahankan legitimasi sosialnya dengan menunjukkan tanggung jawab dan keterbukaan kepada masyarakat melalui pengungkapan informasi keberlanjutan berbasis website sebagai perwujudan prinsip Good Corporate Governance.

Hasil ini mendukung hasil penelitian Kiharo & Kariuki (2018) yang mengemukakan semakin banyak dewan direksi maka akan membuat entitas menjadi lebih efektif dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sesuai temuan riset terdahulu dijalankan Carolina et al., (2018) dewan direksi dikatakan memiliki dampak yang menguntungkan pada nilai perusahaan. Adapun hasil penelitian Mujiani & Jayanti (2021) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai efisiensi good corporate governance suatu perusahaan maka semakin besar tingkat pengungkapan sustainability report.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website



Gambar 4. Diagram Perbandingan Dewan Komisaris Tahun 2022 dan 2023

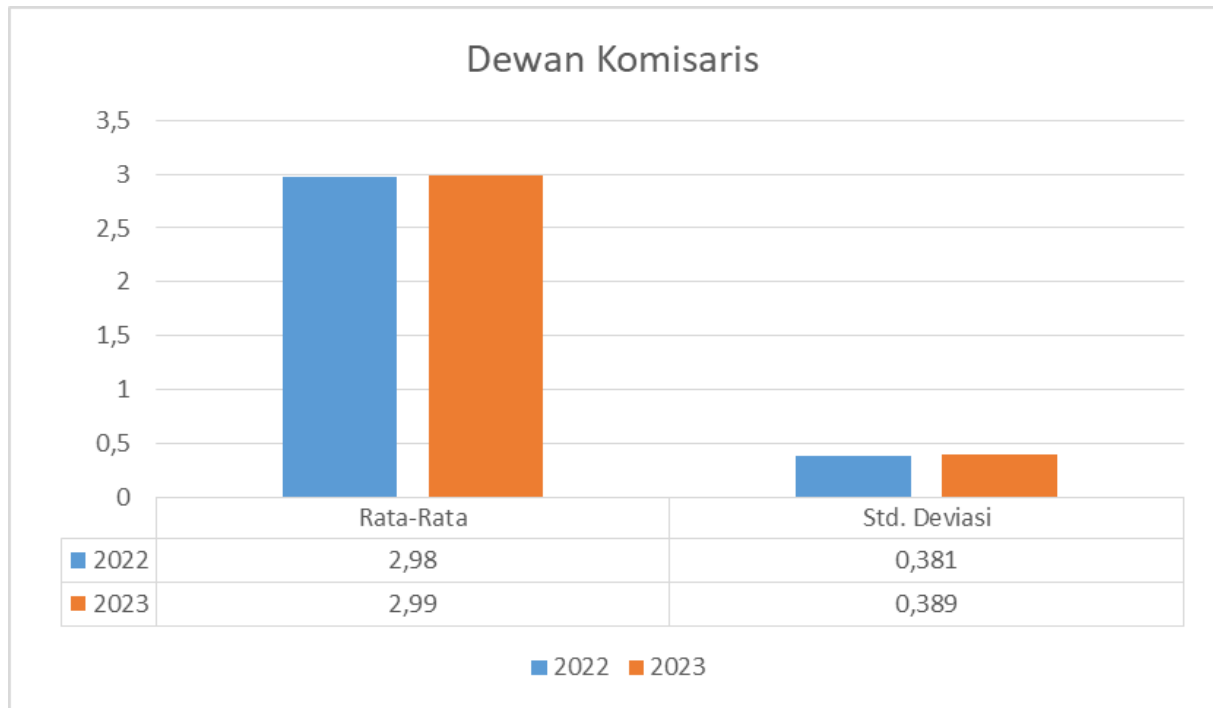
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website (TPIKBW) dengan nilai signifikansi sebesar 0,02 (lebih besar dari $\alpha = 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi yang disampaikan melalui website perusahaan. Berdasarkan data deskriptif, rata-rata jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan manufaktur adalah 3,78 orang pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 3,86 orang pada tahun 2023, dengan standar deviasi masing-

masing 1,745 dan 1,837. Kenaikan pada nilai rata-rata dan standar deviasi ini mencerminkan bahwa meskipun struktur dewan komisaris relatif stabil, terdapat peningkatan kecil dalam variasi jumlah antarperusahaan, yang dapat disebabkan oleh penyesuaian kebijakan tata kelola dan strategi pengawasan. Secara umum, kecenderungan ini menunjukkan adanya upaya perusahaan memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen, yang berimplikasi pada meningkatnya kualitas dan transparansi pengungkapan informasi berbasis website.

Fenomena tersebut mencerminkan kondisi industri manufaktur Indonesia pada periode 2022–2023, di mana penerapan prinsip Good Corporate Governance semakin ditekankan oleh regulator dan investor untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, Dewan Komisaris memiliki fungsi penting sebagai pengawas yang memastikan bahwa Dewan Direksi menjalankan tugasnya secara transparan dan sesuai kepentingan pemegang saham. Peningkatan rata-rata jumlah komisaris pada tahun 2023 menggambarkan bahwa perusahaan mulai memperluas fungsi pengawasan, termasuk dalam memastikan informasi yang disajikan melalui website sesuai dengan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam POJK No. 8 Tahun 2015 tentang keterbukaan informasi emiten atau perusahaan publik. Hasil ini sejalan dengan teori keagenan, di mana dewan komisaris berperan sebagai mekanisme kontrol yang bertugas meminimalkan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham melalui peningkatan transparansi dan pelaporan publik. Selain itu, berdasarkan teori legitimasi, pengawasan yang efektif oleh dewan komisaris mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan dan aktivitas operasionalnya secara terbuka di website sebagai sarana memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Hasil ini mendukung dari hasil penelitian Marlinda et al., (2020) sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance. Dewan komisaris memiliki tugas mencakup mengawasi dewan direksi. Selain memudahkan pengawasan dewan, sejumlah besar dewan komisaris dapat berdampak pada nilai perusahaan. Sesuai temuan riset dijalankan sebelumnya Agustin et al., (2023) dan Marlinda et al., (2020) menunjukkan dewan komisaris berdampak positif pada nilai perusahaan. Adapun hasil penelitian Suharti et al., (2024) yang menunjukkan Dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan keberlanjutan, karena mampu memberikan tekanan pengawasan terhadap manajemen agar lebih transparan.

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website



Gambar 5. Diagram Perbandingan Dewan Direksi Tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis Website (TPIKBW) dengan nilai signifikansi sebesar 0,22 (lebih besar dari $\alpha = 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan atau jumlah anggota komite audit tidak secara langsung memengaruhi tingkat keterbukaan informasi yang disampaikan melalui website perusahaan. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, rata-rata jumlah anggota komite audit pada perusahaan manufaktur adalah 2,98 orang pada tahun 2022 dan 2,99 orang pada tahun 2023, dengan standar deviasi masing-masing 0,381 dan 0,389. Nilai rata-rata dan standar deviasi yang relatif konstan menunjukkan bahwa struktur komite audit perusahaan manufaktur cenderung stabil dan telah memenuhi ketentuan minimal yang diatur oleh OJK, yaitu sekurang-kurangnya tiga orang anggota. Kestabilan ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah membentuk komite audit sesuai regulasi, namun belum tentu diikuti dengan efektivitas dalam meningkatkan keterbukaan informasi berbasis website.

Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan fenomena industri manufaktur selama 2022–2023, di mana fokus utama banyak perusahaan masih tertuju pada pemulihan operasional dan peningkatan efisiensi pascapandemi. Dalam situasi ini, fungsi komite audit lebih banyak diarahkan untuk menjaga kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan dan pengendalian internal dibandingkan mendorong transparansi digital. Padahal, peran komite audit sejatinya tidak hanya memastikan akurasi laporan keuangan, tetapi juga dapat memperluas cakupan pengawasan terhadap keandalan dan kelengkapan informasi nonkeuangan yang disajikan di website perusahaan. Berdasarkan perspektif teori keagenan, komite audit berpotensi menjadi mekanisme pengawasan tambahan yang dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Namun, hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum optimal dalam konteks pengungkapan informasi berbasis website. Dari sudut pandang teori legitimasi, perusahaan seharusnya dapat memanfaatkan komite audit untuk memperkuat

legitimasi publik melalui pengawasan terhadap keterbukaan informasi keberlanjutan, namun pada kenyataannya, peran tersebut belum dimaksimalkan oleh sebagian besar perusahaan manufaktur.

Hasil penelitian ini menginterpretasikan bahwa perusahaan belum secara aktif berupaya memperoleh legitimasi publik melalui pengungkapan informasi keberlanjutan berbasis website. POJK No. 8 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit memang telah mengatur peran komite audit sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (GCG), namun regulasi ini lebih menekankan pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan pengendalian internal, bukan secara spesifik pada pengungkapan informasi keberlanjutan. Akibatnya, perusahaan mungkin belum mengintegrasikan isu keberlanjutan sebagai bagian dari pengawasan komite audit, sehingga pengaruhnya terhadap TPIKBW menjadi tidak signifikan.

Dalam penelitian Barakat et al., (2020) mengungkapkan bahwa komite audit memiliki sedikit hubungan dengan pelaporan keuangan berbasis internet. Kehadiran perusahaan audit eksternal dalam bentuk firma audit yang menjadi third party dalam pengawasan fungsi perusahaan termasuk pengungkapan informasi korporasi berbasis website menunjukkan bahwa kehadiran variabel tersebut berdampak positif pada tingkat pelaporan berbasis website. Hasil penelitian Rinta (2021) menyatakan bahwa di Indonesia, sebagian besar peran komite audit di perusahaan tidak dilaksanakan dengan baik sebab komite audit dibentuk hanya untuk memenuhi kewajiban regulasi oleh OJK RI. Selain itu, pemilihan anggota komite audit hanya orang-orang yang dekat dengan manajemen perusahaan bukan berasal dari latar belakang keahlian profesional, sehingga komite audit tidak akan optimal dalam fungsinya. Oleh karena itu, anggota komite audit yang besar bukan suatu jaminan manajemen korporasi berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Korporasi Berbasis *Website* berdasarkan POJK No.8 Tahun 2015. Alat analisis hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPIKBW (H_1 terdukung). Hal ini menunjukkan bahwa peran strategis dewan direksi dalam menetapkan kebijakan perusahaan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi informasi keberlanjutan. Temuan ini selaras dengan teori keagenan, di mana dewan direksi bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan untuk meminimalkan asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas.
2. Dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPIKBW (H_2 terdukung). Sebagai pihak pengawas, dewan komisaris memiliki peran penting dalam memastikan manajemen menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara transparan. Efektivitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris turut mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi keberlanjutan kepada publik. Hal ini sejalan dengan teori keagenan dan legitimasi, di mana pengawasan yang memadai mendorong

perusahaan memenuhi ekspektasi stakeholders guna mempertahankan keberlanjutan operasionalnya.

3. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap TPIKBW (H_3 tidak terdukung). Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit belum dimanfaatkan secara optimal dalam konteks pengungkapan informasi keberlanjutan berbasis website. Hal ini dapat disebabkan oleh fokus utama komite audit yang masih terbatas pada pengawasan laporan keuangan dan kepatuhan internal, bukan pada aspek keberlanjutan. Meskipun POJK No. 8/POJK.04/2015 mengatur pedoman pelaksanaan kerja komite audit, regulasi tersebut belum secara spesifik mendorong keterlibatan komite audit dalam pengawasan terhadap pengungkapan informasi keberlanjutan.

Referensi :

- Agustin, A. D., Susbiyani, A., & Maharani, A. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(1), 109–119. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i1.953>
- Almilia, L. S. (2009). Analisa Kualitas Isi Financial And Sustainability Reporting Pada Website Perusahaan Go Publik di Indonesia. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, 2009(Snati)*, 34–38.
- Andriyani, R., & Mudjiyanti, R. (2017). Pengaruh Tingkat Profitabilitas, Leverage, Jumlah Dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Internet Financial Reporting (IFR) di Bursa Efek Indonesia. *Kompartemen*, XV(1), 67–81. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/1380>
- Arin, K. P. I. M. P. A. dan N. A. S. D. (2014). Pengaruh Internet Financial Reporting Dan Tingkat Pengungkapan Informasi Website Terhadap Frekuensi Perdagangan Saham. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 2(1). <https://doi.org/10.31289/jimbi.v1i2.394>
- Barakat, F. S. Q., Perez, M. V. L., Ariza, L. R., Barghouthi, O. A., & Islam, K. M. A. I. (2020). the Impact Corporate Governance on Internet Financial Reporting: Empirical Evidence From Palestine. *International Journal of Accounting & Finance Review*, 5(4), 1–22. <https://doi.org/10.46281/ijafr.v5i4.852>
- Bin-Ghanem, H., & Ariff, A. M. (2016). The effect of board of directors and audit committee effectiveness on internet financial reporting Evidence from gulf co-operation council countries. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 6(4), 429–448. <https://doi.org/10.1108/JAEE-07-2014-0037>
- Carolina, V., Marpaung, E. I., & Pratama, D. (2018). Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 9(2), 137–145. <https://doi.org/10.28932/jam.v9i2.481>
- Dianova, A., & Nahumury, J. (2019). Investigating the Effect of Liquidity, Leverage, Sales Growth and Good Corporate Governance on Financial Distress. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(2), 143–156. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i2.49>
- Faisal, A., & Julianti, V. (2020). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Risiko Likuiditas Terhadap Pengungkapan Berbasis Web. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 263–280. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7776>
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Ghozali, I. (2018). Ghozali, I., 2018. Aplikasi analisis multivariate dengan IBM SPSS 25. No Title. In Imam Ghozali (Ed.), *"Aplikasi analisis multivariate dengan IBM SPSS 25."* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

- Hanifah, O. E., & Purwanto, A. (2013). Pengaruh Struktur Corporate Governance dan Financial Indicators terhadap Kondisi Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2, 1-15.
- Hasanah, N. T., Widiyanti, N. W., & Sudarno, S. (2018). Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 115. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i2.8645>
- Hlel, K., Kahloul, I., & Bouzgarrou, H. (2020). IFRS adoption, corporate governance and management earnings forecasts. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(2), 325-342. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2019-0007>
- Houcine, A., Zitouni, M., & Srairi, S. (2022). The impact of corporate governance and IFRS on the relationship between financial reporting quality and investment efficiency in a continental accounting system. *EuroMed Journal of Business*, 17(2), 246-269. <https://doi.org/10.1108/EMJB-06-2020-0063>
- Istiningrum, A. A. (2020). *Corporate Governance, IFRS Disclosure, and Stock Liquidity in Indonesian Mining Companies*. 120(Icmab 2019), 271-278. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200205.047>
- Kalbuana, N., Prasetyo, B., Asih, P., Arnas, Y., Simbolon, S. L., Abdusshomad, A., Kurnianto, B., Rudy, R., Kardi, K., Saputro, R., Yohana, Y., Sari, M. P., Zandra, R. A. P., Pramitasari, D. A., Rusdiyanto, R., Gazali, G., Putri, I. A. J., Nazaruddin, M., Naim, M. R., & Mahdi, F. M. (2021). Earnings Management Is Affected By Firm Size, Leverage And Roa: Evidence From Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(SpecialIssue2), 1-12.
- Kiharo, M. N., & Kariuki, P. W. (2018). Corporate Governance Practices and Firm Value of Listed Commercial Banks in Kenya. *The International Journal Of Business & Management*, 6(3), 184-192.
- Kurniawati, M. (2017). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance , Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting*. 18(2), 163-171. <https://doi.org/10.18196/jai.180280>
- Markonah Markonah, & Prasetyo, J. H. (2018). The effect of good corporate governance on financial performance in sharia commercial banks in Indonesia. *UMMagelang Conference Series*, 9(June), 565-579. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no6.0>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Mayangsari, R. (2018). Pengaruh Struktur Modal, Keputusan Investasi, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan Aneka Industri yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(4), 477-485.
- Meidiawati, K. (n.d.). *Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Mujiani, S., & Jayanti. (2021). Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governance terhadap Sustainability Report pada Perusahaan Peserta ISRA di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Akuntansi* (Vol. 19, Issue 1, pp. 21-44).
- Nugroho, B. A. (2005). *Strategi jitu memilih metode statistik penelitian dengan SPSS*. Andi.
- Onifade, O. C., & Olanrewaju, S. O. (2020). Investigating Performances of Some Statistical Tests for Heteroscedasticity Assumption in Generalized Linear Model: A Monte Carlo Simulations Study. *Open Journal of Statistics*, 10(03), 453-493. <https://doi.org/10.4236/ojs.2020.103029>
- Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 Tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik, 1 (2015).
- Pramudena, S. M. (2017). Impact of Good Corporate Governance on Financial Distress in the Consumer Goods Sector Company. *GATR Journal of Finance and Banking Review*, 2(4), 46-55. [https://doi.org/10.35609/jfbr.2017.2.4\(6\)](https://doi.org/10.35609/jfbr.2017.2.4(6))

- Puspitaningrum, D., & Atmini, S. (2012). Corporate Governance Mechanism and the Level of Internet Financial Reporting: Evidence from Indonesian Companies. *Procedia Economics and Finance*, 2(Af), 157–166. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00075-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00075-5)
- Puspitawati, L., & Susanto, A. (2019). *The Influence of Business Strategy Through the Management Accounting Information System to the Quality of Management Accounting Information - Evidence in Indonesia*. January 2018. <https://doi.org/10.2991/icobest-18.2018.7>
- Rinta, Mei. (2021). Ukuran Dewan Direksi, Aktivitas Komite Audit Dan Ukuran Komite Audit Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 89–103. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1336>
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory. Seventh Edition*. Pearson Prentice Hall: Toronto. www.pearsoncanada.ca.
- Sekaran, U. (1992). *Research Methods for Business : a skill-building approach*.
- Suharti, S., Wandu, W., Halimahtussakdiah, H., & Purnama, I. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Kurs : Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 9(1), 82. <https://doi.org/10.35145/kurs.v9i1.4273>